

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 1959).

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951).

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6)

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor ...).

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelelatarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Kabuapten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 25 Tahun 2001)

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.77.K-MB.01-MEM.B-2022 tentang Kebijakan Mineral Dan Batubara Nasional.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 21 Tahun 1994 tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal.

Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 57/Pdt.G/2018/PN Sdw Tanggal 20 Mei 2019

Sumber Buku

Aboesono, tanpa tahun, Sedjarah Hukum dan Politik Agraria di Indonesia. Djilid 1 (Djaman Pendjadjahan), Akademi Agraria: Jogjakarta

Amir, M. S. 2007. Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah. PT. Mutiara Sumber Widya: Jakarta.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.

Darwis Thaib Dt. Sidi Bandaro, 1967, Seluk Beluk Adat Minangkaba, NV. Nusantara: Bukittinggi

Harsono, Boedi, 2013, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan Pelaksanaannya, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Haryadi, Dwi, 2018, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, UBB Press, Bangka Belitung.

- Ibrahim, Johnny, 2005, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang.
- International Labor Organization, 2003, ILO Convention on Indigenous and Tribal Peoples 1989 (No.169): A Manual, International Labour Office, Jenewa.
- International Labor Organization. 2007. KONVENSI ILO No. 169 Tahun 1989 Mengenai Masyarakat Hukum Adat: Sebuah Panduan (Terjemahan dari Manual ILO No. 169), Dumas-Titoulet Imprimeurs, Perancis.
- International Labour Organization, 2010, Hak-Hak Masyarakat Adat yang Berlaku: Pedoman untuk Konvensi ILO 169, Dumas-Titoulet Imprimeurs, Perancis. dari laman <https://brwa.or.id/assets/image/regulasi/1427799353.pdf> pada tanggal 27 Desember 2021.
- Koesnoe, H.M., 2000, Prinsip- Prinsip Hukum Adat Tentang Tanah, Penerbit Ubhara Press, Surabaya, hlm. 36
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2008, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Marzuki, P.M., 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, UPT Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pide, A.S.M., 2014, Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang, Kencana, Jakarta.
- PT Trubaindo Coal Mining, 2020, “Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan” Hidup, Laporan Triwulan IV/2020 PT Trubaindo Coal Mining, PT Trubaindo Coal Mining: Jakarta
- Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan, 2014, Penelitian Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Tanah di Kalimantan, Kementerian ATR/BPN: Jakarta

- Salim H.S., 2014, Hukum pertambangan di Indonesia, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sembiring, Julius, 2018, Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat, STPN Press: Yogyakarta
- Sembiring, Rosnidar, 2017, Hukum Pertanahan Adat, Rajawali Pers, Depok.
- Sjahmunir, 2006, Eksistensi Tanah Ulayat Dalam Perundang-undangan Indonesia, PPIM, Padang
- Soedikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simarmata, Rikardo, 2006, Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia, RIPP/UNDP, Bangkok.
- Sudiyat, I., 1981, Hukum Adat, Sketsa Asas, Liberty: Yogyakarta.
- Sudrajat, N., 2010. Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum, Yustisia: Yogyakarta, hlm. 164
- Sugiyono, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND, Alfabeta, Bandung.
- Sukandarrumidi, 1942, Bahan-Bahan Galian Industri, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sumardjono, M.S.W., 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya, Kompas, Jakarta
- Sumardjono, M.S.W., 2009, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta.
- Sumardjono, M.S.W., 2019, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Susilo, Gudnanto dan Rahardjo, 2011, Pemahaman Individu Teknik Non-Tes, Nora Media Enterprise, Kudus.
- Warman, Kurnia. 2010. Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara di Sumatera Barat, HuMa, Jakarta.

Presentasi dan Seminar

Arif, Irwandy, “Tata Kelola Pertambangan Mineral Dan Batubara Indonesia. Presentsi Pelatihan dasar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara 2021”, <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2021/07/Pelatihan-Dasar-Hukum-Pertambangan-Minerba-12-Juli-2021-1.pdf> , diakses tanggal 2 Januari 2022.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, “Tanpa Tahun, Laporan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik Aspek Teknis Pertambangan. ESDM”, [https://www.academia.edu/13037536/Good Mining Practices](https://www.academia.edu/13037536/Good_Mining_Practices), diakses tanggal 4 Januari 2022.

Novita Sari et. al., “Pengelolaan Harta Pusaka Tinggi di Solok Selatan”. Prosiding Seminar UNIMUS Vol. 4, November 2021. Hlm. 1921.

PB AMAN, “Bahan sosialisasi AMAN untuk masyarakat ada: ‘Gerakan Sosial untuk Berdaulat, Mandiri, dan Bermartabat’”. <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-RUU-Masyarakat-Adat-Pengakuan-dan-Perlindungan-Negara-pada-Masyarakat-Adat-1493887171.pdf> , diakses 3 Januari 2022.

Jurnal/Artikel

Fatmi, S.R., 2018, “Permohonan Tanah Ulayat di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik”, Lentera Hukum, Vol. 5, Nomor 3, Desember 2018,

Hayati, Tri, “Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No.3, Juli-September 2019.

Ismi, H., “Hak Atas Tanah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No.20, Februari-Juli 2014.

Isnawati, “Perlindungan Kepentingan Daerah dalam Investasi Pertambangan Pasca UU Minerba”, dalam Rumadan, Ismail, 2020, Indonesia the Mining Law Review: Telaah atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan Batubara, Deepublish, Yogyakarta.

Mawar, Sitti, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum”, Jurnal Justisia, Vol. 1, No. 1, 2016.

- Muhdar, M. dan Nasir, 2012, “Resolusi Konflik terhadap Sengketa Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam”, Kertas Kerja Epistema No.3.2012, Epistema Institute: Jakarta, hlm. 13
- Rosalina, “Eksistensi Hak Ulayat di Indonesia”, Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 3, Juli-September 2020.
- Sabri, M. dan Hanifuddin, I, “Harta Dalam Konsepsi Adat Minangkabau”, JURIS Vol.11(1) Juni 2012.
- Santiago, F., dan Tiawarman, A., “Hukum Pertambangan dari Masa ke Masa”, dalam Rumadan, Ismail, 2020, Indonesia the Mining Law Review: Telaah Atas Kebijakan Hukum Pertambangan Di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral Dan Batu Bara, Deepublish, Yogyakarta.
- Simarmata, Rikardo, 2022, Draft Modul Identifikasi Tanah Ulayat Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Partisipasi Masyarakat (PTSL PM) FASE V [manuskrip belum dipublikasikan].
- Simarmata, R. dan Chamdani, M.C., tanpa tahun, Implementation of Systematic and Complete Land Registration in Mining Areas, The World Bank & Kementerian ATR/BPN.
- Sirait et. al., 2005, “Perjalanan ‘Kilip’ Mencari Pengakuan; Refleksi Pengembangan Methodologi Identifikasi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat Secara Partisipatif di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur”, Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi. Yayasan Kemala: Jakarta.
- Soesangobeng, H., “Possibility and Mode of Registering Adat Title on Land”, 3rd FIG Regional Conference Jakarta, Indonesia, 2004. Hlm 4/17.
- Tri Hayati, “Hak Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya Alam dan Implikasinya terhadap Bentuk Pengusahaan Pertambangan”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49, No.3, Juli-September 2019.
- Warman, Kurnia dan Andora, Hengki, “Pola Hubungan Hukum dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 26, No.3, Oktober 2014.

Yarsina, N., “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat yang Telah Bersertifikat di Kota Bukittinggi”, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 3 No. 2, Maret 2018

Yurista, A.P., “Pengejawantahan Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No.2, Juni 2016.

Koran

Maria S.W. Sumardjono. “Hak Ulayat dan Pengakuannya oleh UUPA”, *Kompas*, 13 Mei 1993.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Chasanah, Nia, 2019, Hak Ulayat sebagai Hak Komunal: Pemaknaan dan Perlindungannya dalam Hukum Pertanahan Nasional Indonesia, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Desyalika, Nabilla, 2014, Kedudukan Hukum Kegiatan Usaha Pertambangan pada Kawasan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam Konteks Negara Kesejahteraan, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Oktinaldi, 2012, Pola Pengolahan Hutan Lindung Sebagai Lahan Pertanian Masyarakat (Studi Kasus Di Kenagarian Air Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok), Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas: Padang

Sandila, Wingga, 2016, Penyerahan Tanah Ulayat Kaum untuk Usaha Pertambangan di Batu Bagendeng Kenagarian Pakan Rabaa Utara Kabupaten Solok Selatan oleh PT Universal Mining Prima, Tesis, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas, Padang.

Sillander, K., 2004, *Acting Authoritatively: How Authority is Expressed through Social Action among the Bentian of Indonesian Borneo*, disertasi akademik Faculty of Social Sciences University of Helsinki: Helsinki.

Surya, Khamisli, 2018, Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Adat di Kecamatan Kuranji Kota Padang. Tesis Pascasarjana Universitas Andalas: Padang.

Naskah Akademik/Naskah RUU

Dewan Perwakilan Rakyat. Versi 2017. Naskah Rancangan Undang tentang Masyarakat Adat. DPR: Jakarta diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20171106-094054-1309.pdf>.

Simarmata, Rikardo. 2016. Penjelasan Konsep-Konsep Kunci Terkait Masyarakat Hukum Adat bagian dari Bab II Naskah Akademik RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, versi 08 November 2016.

Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, 2004, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM: Jakarta

Laman Internet

Badan Pusat Statistik, “Konsep Pertambangan”, <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html#subjekViewTab1>, diakses pada tanggal 26 Desember 2021

Dun&Bradstreet, 2009, People Menace to Halt Activities of Trubaindo, diakses pada tanggal 25 Juni 2022 dari <https://www.dnb.co.id/news/people-menace-to-halt-activities-of-trubaindo>

Gusveri Handiko, 2021, Struktur Kemasyarakatan Masyarakat Minangkabau, diakses pada 10 September 2022 dari <https://dutadamaisumaterabarat.id/struktur-kemasyarakatan-masyarakat-minangkabau/>

Human Rights Australia, “UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples”, <https://humanrights.gov.au/our-work/un-declaration-rights-indigenous-peoples-1>, diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

Krisno, O., 2019, Kerabat Kesultanan Kutai Hadirkan Bukti Baru soal Lahan Pembangunan IKN, dalam SindoNews, diakses pada tanggal 20 Juli 2022, dari

<https://daerah.sindonews.com/berita/1469527/174/kerabat-kesultanan-kutai-hadirkan-bukti-baru-soal-lahan-pembangunan-ikn?showpage=all>

Lex, 2011, “Ganti Rugi Rp 10 Juta /Hektare”, *Koran Tribun Kaltim*, 23 Mei 2011, hlm. 16 diakses pada https://issuu.com/tohirtribun/docs/2305_gabung1/16

Lex, 2009, “Ganti Rugi Tanah Warga Bentian Besar Belum Jelas”, *Koran Tribun Kaltim*, 2 September 2009, hlm. 16 diakses pada https://issuu.com/tohirtribun/docs/0209_gabungan

Muflihun Hidayat, 2019, Cerita Dayak Bentian Yang Tanahnya Dirampas Tambang, dalam *Tambang.co.id*, diakses pada 25 Juni 2022 dari <https://www.tambang.co.id/cerita-dayak-bentian-yang-tanahnya-dirampas-tambang>

Warman, Kurnia, “Peta Perundang-undangan tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat”. https://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284, diakses 1 Januari 2022.

Warning Time, 2019, Tuntut Ganti Rugi Kepada WNA Kuasai Tanah Adat, diakses pada 25 Juni 2022 dari <https://warningtime.com/index.php/2019/12/18/tuntut-ganti-rugi-kepada-wna-kuasai-tanah-adat/>